



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HJ. HADARIA, tempat dan tempat dan tanggal lahir di Takkalalla Timur, 31 Desember 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan Bulu Dua, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 02 Februari 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **HJ. HADARIA** lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969 adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama La Sunu dan Ibu kandung bernama Napi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-30092020-0040 tertanggal 02 Oktober 2020;
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah **HJ. HADARIA**, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969 sedangkan di dalam Paspor tertulis nama, tempat,



tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah **HADIRIAH LASUNU**, lahir di Talabangi, pada tanggal 15 Mei 1973;

4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon akan berangkat ke malaysia untuk menghadiri perkawinan kerabat Pemohon dan telah di berikan Surat Penjaminan namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon

6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;

7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

8. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Maccirinna dengan Nomor: 148.4/08/KM/II/2024 bahwa HJ. HADARIA, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969 dengan **HADIRIAH LASUNU**, lahir di Talabangi, pada tanggal 15 Mei 1973 yang tertera pada paspor Pemohon adalah orang yang sama.

9. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto Copy Surat Penjaminan
 - Foto Copy Paspor
 - Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Mallongilongi
- Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.



Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar untuk keperluan penerbitan paspor adalah nama **HJ. HADARIA**, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama La Sunu dan Ibu kandung bernama Napi, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
- Bukti P-4 Fotokopi Paspor Pemohon;
- Bukti P-5 Tangkapan surat penjaminan;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat surat keterangan yang menyatakan orang yang sama yang dikeluarkan oleh Lurah Pekkabata;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rasmi Rahim binti Rahim;



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon tinggal Lingkungan Bulu Dua, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa yang berbeda dalam paspor pemohon adalah nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal lahir pemohon;
- Bahwa identitas pemohon lahir di Takkalalla Timur;
- Bahwa identitas pemohon Namanya ada perbedaan dimana di paspor tercantum Hadiriah Lasunu sementara yang benar adalah Hadaria
- Bahwa saksi terjadi perbedaan pencatatan nama milik pemohon di paspor karena saat pembuatan dulu menggunakan bantuan calo;
- Bahwa foto yang ada dalam data paspor yang adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon hendak digunakan untuk pergi ke Malaysia untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun dideportasi dari luar negeri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Heni Andini binti M. Adzim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pemohon tinggal Lingkungan Bulu Dua, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa yang berbeda dalam paspor pemohon adalah nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal lahir pemohon;
- Bahwa identitas pemohon lahir di Takkalalla Timur;
- Bahwa identitas pemohon Namanya ada perbedaan dimana di paspor tercantum Hadiriah Lasunu sementara yang benar adalah Hadaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terjadi perbedaan pencatatan nama milik pemohon di paspor karena saat pembuatan dulu menggunakan bantuan calo;
- Bahwa foto yang ada dalam data paspor yang adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon hendak digunakan untuk pergi ke Malaysia untuk menghadiri undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana ataupun dideportasi dari luar negeri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah Hj. Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969, bersesuaian dengan identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon berdomisili di Lingkungan Bulu Dua, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;



Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

1. Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan tercantum pula dalam Kartu Keluarga adalah Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Foto copy Paspor Pemohon tercantum nama **HADIRIAH LASUNU**, lahir di Talabangi, pada tanggal 15 Mei 1973 dimana berdasarkan surat-surat bahwa terdapat perbedaan



identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969, bahwa selain itu para saksi menjelaskan pula foto yang berada dalam bukti tersebut adalah benar foto orang yang sama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Hadaria lahir pada tanggal 31 Desember 1969 di Takalalla Timur, bersesuaian dengan P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dikuatkan dengan bukti surat P-6 menerangkan Pemohon tersebut adalah sebenarnya orang yang sama dengan **HADIRIAH LASUNU**, lahir di Talabangi, pada tanggal 15 Mei 1973 yang tercantum dalam paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dikuatkan dengan bukti surat P-5 adalah benar untuk menghadiri undangan dan bukan untuk keperluan bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar Hj Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969, bersesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut bersifat voluntair maka pemohon haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar untuk keperluan penerbitan paspor adalah nama Hj. Hadaria, lahir di Takkalalla Timur, pada tanggal 31 Desember 1969 , anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama La Sunu dan Ibu kandung bernama Napi, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Samzang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samzang, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNPB : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
- Sumpah: Rp 40.000,00
- Materai: Rp 10.000,00
- Leges: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp 150.000,00
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)